

DETERMINAN KEMISKINAN PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2010-2024

Dimas Putra Pangestu; Muhammad Arif
Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan utama pembangunan daerah karena berkaitan dengan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Tingginya tingkat kemiskinan dapat menghambat pembangunan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat di suatu wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka, ketimpangan pendapatan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, serta belanja bantuan sosial terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2010–2024. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel dengan pemilihan model terbaik melalui uji Chow dan Hausman sehingga diperoleh *Fixed Effects Model* (FEM) sebagai model terbaik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sebaliknya, belanja bantuan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka, ketimpangan pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pembangunan manusia, serta meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran bantuan sosial agar dapat memberikan dampak yang lebih optimal terhadap penurunan kemiskinan.

Kata Kunci: Kemiskinan, IPM, Bantuan Sosial, Data Panel.

Abstract

Poverty is a major issue in regional development, as it is linked to low levels of public welfare. High poverty rates can hinder economic development and the quality of life for communities within a region. This study aims to analyze the impact of the open unemployment rate, income inequality, the Human Development Index (HDI), economic growth, and social assistance spending on poverty levels across regencies and cities in East Java Province from 2010 to 2024. The study utilizes secondary data obtained from Statistics Indonesia (BPS) and the Directorate General of Fiscal Balance at the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. Analysis was conducted using panel data regression; the best model was selected via Chow and Hausman tests, resulting in the Fixed Effects Model (FEM) as the optimal choice. The results indicate that the HDI has a significant negative effect on poverty levels. Conversely, social assistance spending has a significant positive effect on poverty. Meanwhile, the open unemployment rate, income inequality, and economic growth do not have a significant effect on poverty levels. Local governments need to improve human resource quality through education and human development, as well as enhance the effectiveness and targeting accuracy of social assistance to achieve a more optimal impact on poverty reduction.

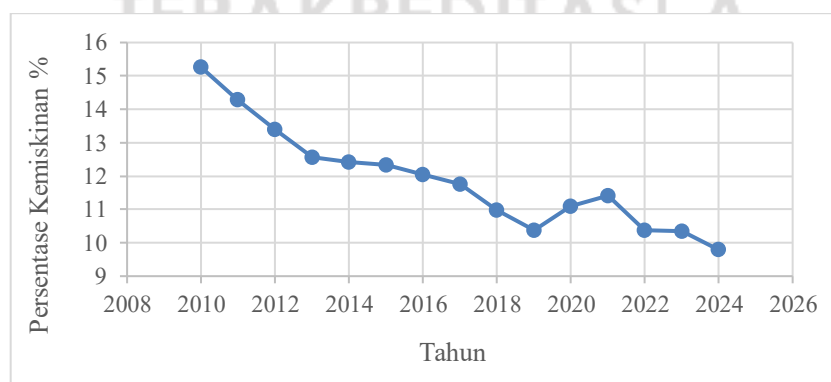
Keywords: Poverty, HDI, Social Assistance, Panel Data.

1. PENDAHULUAN

kemiskinan merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh negara berkembang, termasuk Indonesia. Hal ini disebabkan karena kemiskinan tidak hanya mencerminkan rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga menjadi indikator penting dalam menilai tingkat kesejahteraan suatu wilayah. Tingginya tingkat kemiskinan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi serta memperburuk kondisi sosial masyarakat (Todaro & Smith, 2015). Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan menjadi prioritas dalam pembangunan ekonomi nasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan tren menurun dalam beberapa tahun terakhir. Persentase penduduk miskin tercatat sebesar 9,36% pada Maret 2023 dan menurun menjadi 9,03% pada Maret 2024. Jumlah penduduk miskin juga mengalami penurunan dari 25,90 juta orang pada Maret 2023 menjadi 25,22 juta orang pada Maret 2024. Penurunan tersebut terjadi baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan, yang masing-masing menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan masyarakat (BPS, 2024).

Sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, Provinsi Jawa Timur memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Besarnya jumlah penduduk menjadikan permasalahan kemiskinan di wilayah ini bersifat kompleks dan memerlukan perhatian khusus. Meskipun secara umum tingkat kemiskinan di Jawa Timur menunjukkan tren penurunan, jumlah penduduk miskin yang masih relatif besar serta adanya perbedaan tingkat kemiskinan antar kabupaten/kota menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan belum sepenuhnya terselesaikan. Ketimpangan tingkat kemiskinan antar wilayah tersebut mengindikasikan bahwa hasil pembangunan belum sepenuhnya merata. Perkembangan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada tabel berikut.



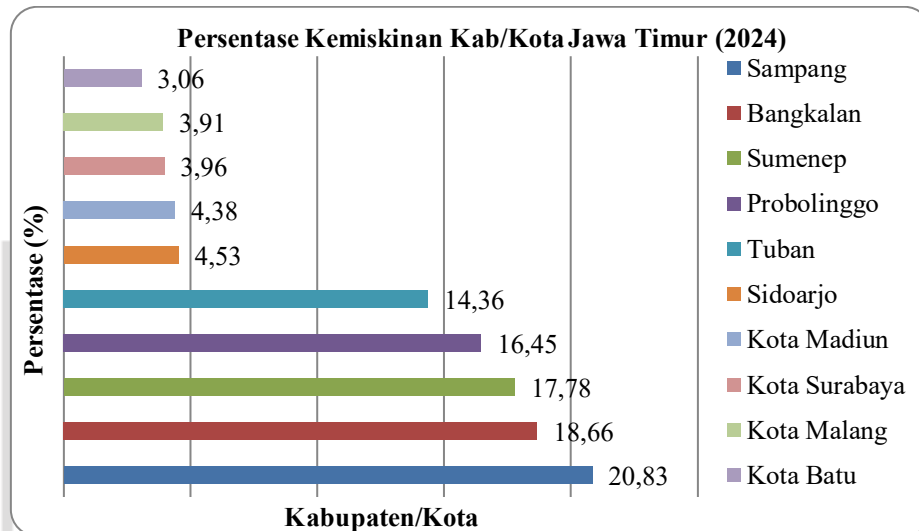
Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1. Persentase Kemiskinan Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 –2024

Gambar 1 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur cenderung mengalami penurunan dalam jangka panjang, meskipun sempat mengalami peningkatan pada tahun 2020–2021 yang dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang menekan aktivitas ekonomi masyarakat.

Penurunan pada tahun-tahun berikutnya menunjukkan adanya perbaikan kondisi ekonomi. Namun demikian, penurunan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan kesejahteraan, karena masih terdapat perbedaan tingkat kemiskinan antar kabupaten/kota di Jawa Timur.

Untuk melihat kondisi tersebut secara lebih rinci, berikut disajikan persentase kemiskinan kabupaten/kota tertinggi dan terendah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.



Sumber: Badan Pusat Statistika

Gambar 2. Persentase Kemiskinan Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

Berdasarkan Gambar 2, terlihat bahwa terdapat perbedaan tingkat kemiskinan yang cukup signifikan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Tingkat kemiskinan tertinggi berada pada wilayah seperti Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan, sedangkan tingkat kemiskinan terendah terdapat pada kota-kota besar seperti Kota Batu dan Kota Malang. Perbedaan ini menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah yang menjadi salah satu permasalahan penting dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Dalam literatur ekonomi pembangunan, kemiskinan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pembangunan manusia, pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi. Pendidikan yang lebih tinggi dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memperluas peluang kerja (Todaro & Smith, 2015). Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator kualitas hidup juga memiliki peran penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan (UNDP, 2020).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam terkait faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan. Penelitian yang dilakukan oleh Prassetianwar dan Arif (2023) menunjukkan IPM memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Peningkatan IPM mencerminkan membaiknya kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap fasilitas publik sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan

kemiskinan. Penelitian lain oleh Nizar dan Arif (2023) menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara Barat. Peningkatan tingkat pendidikan mampu menurunkan kemiskinan karena pendidikan merupakan bentuk investasi sumber daya manusia yang dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas masyarakat. Semakin baik kualitas pendidikan, semakin besar peluang masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan keluar dari lingkaran kemiskinan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Rossa dan Ananda (2024) yang menyatakan bahwa belanja bantuan sosial berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2022.

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas determinan kemiskinan, sebagian besar penelitian masih menggunakan variabel yang terbatas serta periode waktu yang relatif pendek. Selain itu, penelitian yang mengkaji secara simultan variabel pengangguran, ketimpangan pendapatan, pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, serta bantuan sosial pada tingkat kabupaten/kota dengan periode panjang masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menggunakan data panel periode 2010–2024 serta mengkombinasikan variabel sosial ekonomi dan fiskal daerah secara simultan.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka, ketimpangan pendapatan, Indeks Pembangunan Manusia, pertumbuhan ekonomi, serta belanja bantuan sosial terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2010–2024 dengan menggunakan pendekatan regresi data panel. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris yang lebih komprehensif serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

1.1 Kemiskinan

Menurut Mandjarreki (2021), kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan hidup yang layak serta rentan terhadap berbagai risiko sosial ekonomi. Keberadaan kemiskinan menyebabkan terbentuknya kondisi di mana pemenuhan hak-hak dasar, seperti pangan, air bersih, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan, menjadi sulit dijangkau oleh sebagian besar masyarakat. Dengan demikian, kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya tingkat pendapatan, tetapi juga mencerminkan keterbatasan pada berbagai dimensi kehidupan, seperti kesehatan, pendidikan, dan kemampuan ekonomi, sehingga perlu dipahami sebagai permasalahan yang bersifat multidimensi (Tisniwati, 2012).

1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Menurut Badan Pusat Statistik (2021), pengangguran merupakan penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan termasuk dalam angkatan kerja, yaitu mereka yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan, atau telah diterima bekerja tetapi

belum mulai bekerja. Tingginya angka pengangguran disebabkan oleh ketidaksesuaian antara kebutuhan perusahaan dan kualifikasi para pencari kerja. Banyak perusahaan mensyaratkan pelamar memiliki pendidikan minimal diploma atau sarjana, sehingga tidak semua pencari kerja dapat memenuhi persyaratan tersebut. Oleh karena itu, permasalahan pengangguran merupakan tanggung jawab bersama, terutama pemerintah, untuk mencari solusi yang efektif dalam menekan angka pengangguran di Indonesia (Ardian et al., 2022). Penanganan masalah pengangguran dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Silaban et al., 2020).

1.3 Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan merupakan kondisi di mana distribusi pendapatan dalam masyarakat tidak merata sehingga menimbulkan kesenjangan antara kelompok berpendapatan tinggi dan rendah, yang umumnya diukur menggunakan Indeks Gini. Ketimpangan pendapatan bukan hanya menjadi persoalan di negara berkembang, tetapi juga dialami oleh negara maju. Perbedaannya terletak pada tingkat ketimpangan yang terjadi serta tingkat kesulitan dalam mengatasinya (Febriyani & Anis, 2021). Penanganan ketimpangan menjadi sangat penting, karena tingginya ketimpangan pendapatan dapat menurunkan efektivitas kebijakan pembangunan, termasuk upaya pengentasan kemiskinan (Kaulihoa & Adjasi, 2018). Penelitian oleh Barika dan Yusnida (2021) menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan berkaitan dengan kemiskinan karena distribusi pendapatan yang tidak merata menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.4 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai capaian pembangunan manusia berdasarkan dimensi dasar kualitas hidup. IPM dibangun dari tiga aspek utama, yaitu kesehatan, pendidikan (pengetahuan), dan standar hidup layak, sehingga dapat mencerminkan tingkat kualitas hidup masyarakat (Herdiansyah & Kurniati, 2020). IPM berkaitan dengan tingkat kemiskinan karena peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat (Mirza, 2011). IPM berperan dalam menurunkan kemiskinan melalui peningkatan kemampuan individu dalam memperoleh pendapatan dan memenuhi kebutuhan hidup (Pratama, 2014).

1.5 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan pendapatan atau output nasional suatu negara yang terjadi dari waktu ke waktu (Simanungkalit, 2020). Pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya perkembangan aktivitas ekonomi yang berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak selalu secara langsung menurunkan kemiskinan apabila hasil pembangunan tidak terdistribusi pendapatan antar wilayah (Soleh, 2015).

1.5 Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun (2020), belanja bantuan sosial merupakan pengeluaran pemerintah yang dialokasikan dalam bentuk uang atau barang kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang bersifat tidak secara terus-menerus dan selektif dengan tujuan melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial memiliki peran dalam mengurangi beban ekonomi masyarakat miskin, meskipun dalam implementasinya masih ditemukan kendala seperti ketidaktepatan sasaran (Salsabila et al., 2024).

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Variabel yang digunakan meliputi tingkat kemiskinan (POV), tingkat pengangguran terbuka (UNEMP), ketimpangan pendapatan (KP), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi (GROWTH), serta belanja bantuan sosial (BBS).

Data yang digunakan berupa data panel yang merupakan gabungan data cross section dan time series. Data cross section terdiri dari 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, sedangkan data time series mencakup periode tahun 2010–2024. Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dengan tiga pendekatan estimasi, yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Pemilihan model terbaik dilakukan melalui uji Chow dan uji Hausman. Model ekonometrika dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$POV_{it} = \beta_0 + \beta_1 UNEMP_{it} + \beta_2 KP_{it} + \beta_3 IPM_{it} + \beta_4 GROWTH_{it} + \beta_5 LogBBS_{it} + \varepsilon_{it}$$

di mana :

POV	: Kemiskinan
UNEMP	: Tingkat pengangguran terbuka
KP	: Ketimpangan pendapatan
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
GROWTH	: Pertumbuhan ekonomi
LogBBS	: Belanja bantuan sosial
β_0	: Konstanta
β_1	: Koefisien Tingkat pengangguran terbuka
β_2	: Koefisien Ketimpangan pendapatan
β_3	: Koefisien Indeks Pembangunan manusia
β_4	: Koefisien Pertumbuhan ekonomi
β_5	: Koefisien Belanja bantuan sosial pemerintah
ε	: Error term
i	: 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur

t : Tahun 2010-2024

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Estimasi model regresi data panel dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Hasil estimasi ketiga model tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1
Hasil Regresi CEM, FEM, dan REM

			Model Estimasi		
Notasi	Keterangan Variabel	Identitas	Common Effect	Fixed Effect	Random Effect
C	Konstanta	Koefisien	67,70696	34,92169	36,28136
		Prob	0,0000	0,0000	0,0000
UNEMP	Tingkat Pengangguran Terbuka	Koefisien	-0,098737	0,028103	0,011818
		Prob	0,2196	0,4717	0,7600
KP	Ketimpangan Pendapatan	Koefisien	-12,66700	-2,455286	-2,523016
		Prob	0,0008	0,1207	0,1100
IPM	Indeks Pembangunan Manusia	Koefisien	-0,623556	-0,394360	-0,408337
		Prob	0,0000	0,0000	0,0000
GROWTH	Pertumbuhan Ekonomi	Koefisien	-0,209622	0,006755	-0,003422
		Prob	0,0000	0,7108	0,8500
Log(BBS)	Bantuan Sosial	Koefisien	-0,280653	0,225834	0,215864
		Prob	0,0053	0,0000	0,0000
R ²			0,663455	0,959542	0,604795
Adjusted R-squared			0,660471	0,956318	0,601291
F-statistik			222,3705	297,5930	172,6211
Prob F-statistik			0,000000	0,000000	0,000000

Sumber: BPS, diolah

Tabel 2. Pemilihan Model Terbaik

Uji Chow			
Effects Test	Statistic	d.f	Prob.
Cross-section F	104,237982	(37,527)	0,0000
Cross-section Chi-square	1207,528969	37	0,0000
Uji Hausman			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	31,330624	5	0,0000

Sumber: BPS, diolah

Setelah melakukan regresi CEM, FEM, dan REM, perlu dilakukan dua pengujian untuk menentukan

model manakah yang terpilih untuk digunakan dalam mengestimasi data panel. Pertama, Uji Chow dilakukan untuk menentukan model yang terpilih antara CEM dan FEM. Kedua, Uji Hausman dilakukan untuk menentukan model yang terpilih antara FEM dan REM.

Ketentuan dalam Uji Chow adalah apabila probabilitas F -statistik $< \alpha$, maka H_0 ditolak, yang artinya FEM adalah model yang terbaik untuk digunakan daripada CEM. Ketentuan dalam Uji Hausman adalah apabila probabilitas $\chi^2 < \alpha$, maka H_0 ditolak, sehingga FEM adalah model yang lebih tepat digunakan dibandingkan REM.

Tabel 2 menunjukkan probabilitas *Cross-section F* sebesar $0,000 < \alpha$ (0,05). Dengan demikian, H_0 ditolak, sehingga FEM adalah model terbaik yang akan digunakan untuk mengestimasi data panel. Hasil Uji Hausman menunjukkan probabilitas χ^2 sebesar $0,0000 < \alpha$ (0,05), sehingga H_0 ditolak, yang berarti FEM adalah model yang lebih tepat digunakan.

Eksistensi model diuji melalui uji F , dengan H_0 yang menyatakan bahwa $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = 0$, yang berarti tingkat pengangguran terbuka, ketimpangan pendapatan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, dan belanja bantuan sosial secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. H_0 ditolak apabila probabilitas F -statistik kurang dari α .

Lalu, uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individu berpengaruh nyata terhadap variabel dependen. H_0 menyatakan bahwa variabel independen ke- i tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. H_A menyatakan bahwa variabel independen ke- i berpengaruh terhadap kemiskinan. H_0 ditolak apabila probabilitas t -statistik kurang dari α .

Tabel 3. Hasil Regresi FEM

$$POV_{it} = 34,92169 + 0,028103UNEMP_{it} - 2,455286KP_{it} - 0,394360IPM_{it}^* + 0,006755GROWTH_{it} + 0,225834LOG(BBS)_{it}^*$$

$$R^2 = 0,959; F-stat = 297,5930; Prob. F-stat = 0,0000$$

Keterangan: *koefisien signifikan pada α 0,01; **koefisien signifikan pada α 0,05; ***koefisien signifikan pada α 0,1

Berdasarkan Tabel 3, diketahui bahwa nilai probabilitas F -statistik sebesar $0,000 < \alpha$ (0,05) yang berarti H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (UNEMP), ketimpangan pendapatan (KP), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi (GROWTH), dan belanja bantuan sosial (BBS) secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemiskinan di 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2024.

Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,959 yang berarti bahwa 95,9% variasi kemiskinan disebabkan oleh variasi tingkat pengangguran terbuka, ketimpangan pendapatan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, dan belanja bantuan sosial. Sisanya yaitu sebesar 4,1% disebabkan oleh variabel lain di luar model terestimasi.

Tabel 4. Hasil Uji t

Variabel	Koefisien	Prob. t	Kesimpulan
<i>UNEMP</i>	0,720295	0,4717	Tidak signifikan
<i>KP</i>	-1,554352	0,1207	Tidak signifikan
<i>IPM</i>	-23,02362	0,0000	β_3 signifikan pada α 0,01
<i>GROWTH</i>	0,370965	0,7108	Tidak signifikan
<i>LOG(BBS)</i>	4,465617	0,0000	β_5 signifikan pada α 0,01

Tabel 4 menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Variabel BBS berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan UNEMP, KP dan GROWTH tidak berpengaruh.

3.1 Pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan

Variabel tingkat pengangguran terbuka memiliki koefisien sebesar 0,028103 dengan probabilitas 0,4717, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Kondisi ini dapat dijelaskan karena indikator tingkat pengangguran terbuka tidak hanya mencerminkan penduduk yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga mencakup penduduk yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, serta mereka yang memperoleh pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Selain itu, tidak semua penganggur berada dalam kondisi miskin karena sebagian masih memperoleh dukungan ekonomi dari keluarga atau memilih menunggu pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan harapan upah. Di sisi lain, masih terdapat masyarakat yang telah bekerja, tetapi tetap berada di bawah garis kemiskinan karena pendapatan yang diperoleh belum mampu memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, perubahan tingkat pengangguran terbuka tidak selalu diikuti oleh perubahan tingkat kemiskinan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mukhtar et al. (2019), yang menyatakan bahwa tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia pada periode 2011-2014. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa tidak signifikannya pengaruh tingkat pengangguran terbuka disebabkan oleh indikator TPT tidak hanya mencerminkan individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga mencakup mereka yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, atau belum mulai bekerja. Selain itu, tidak semua penganggur termasuk dalam kelompok miskin, sedangkan sebagian masyarakat yang telah bekerja juga masih dapat berada dalam kondisi miskin akibat rendahnya pendapatan yang diterima. Temuan serupa juga diperoleh Putri dan Putri (2021) yang menyatakan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif, tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2010-2019.

Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Sari (2021), yang menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap peningkatan tingkat pengangguran terbuka

akan diikuti oleh peningkatan tingkat kemiskinan. Kondisi ini terjadi karena meningkatnya jumlah pengangguran menyebabkan berkurangnya kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendapatan. Akibatnya, pendapatan per kapita dan tingkat kesejahteraan masyarakat menurun sehingga meningkatkan risiko kemiskinan.

Perbedaan hasil penelitian ini diduga dipengaruhi oleh karakteristik wilayah penelitian. Provinsi Jawa Tengah memiliki kondisi sosial ekonomi dan struktur pasar kerja yang berbeda dengan Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, penelitian ini dilakukan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki karakteristik ekonomi lebih beragam sehingga perubahan tingkat pengangguran terbuka belum tentu diikuti oleh perubahan tingkat kemiskinan secara signifikan,

3.2 Pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap Kemiskinan

Variabel ketimpangan pendapatan memiliki koefisien sebesar -2,455286 dengan nilai probabilitas 0,1207 sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perubahan tingkat ketimpangan pendapatan belum diikuti oleh perubahan tingkat kemiskinan secara signifikan. Salah satu penyebabnya adalah distribusi pendapatan yang belum merata serta masih adanya kesenjangan pembangunan dan akses terhadap peluang ekonomi antarwilayah sehingga perubahan ketimpangan pendapatan belum memberikan dampak yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dianti et al. (2024) yang menyatakan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa kondisi tersebut disebabkan oleh distribusi pendapatan yang belum optimal serta masih adanya ketimpangan pembangunan antarwilayah. Temuan tersebut juga didukung oleh Safrinja et al. (2025), yang menyatakan bahwa pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan belum cukup kuat karena keterbatasan akses masyarakat terhadap peluang ekonomi serta optimalnya kebijakan redistribusi pendapatan.

Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Sayekti dan Purnomo (2026) yang menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi ketimpangan pendapatan, semakin besar kesenjangan kesejahteraan sehingga kelompok berpendapatan rendah semakin sulit memperoleh akses terhadap kesempatan ekonomi dan pada akhirnya meningkatkan kemiskinan. Perbedaan hasil penelitian ini diduga dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik wilayah, periode penelitian, dan metode analisis yang digunakan,

sehingga hubungan antara ketimpangan pendapatan dan kemiskinan menghasilkan temuan yang berbeda

3.3 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan

Variabel IPM memiliki koefisien sebesar -0,394360 dengan nilai probabilitas 0,0000, sehingga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan IPM sebesar 1 poin akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,394360 persen. Semakin tinggi kualitas pembangunan manusia, semakin besar kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan keluar dari kondisi kemiskinan. Kondisi tersebut terjadi karena Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator yang menggambarkan kualitas sumber daya manusia melalui tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.

Peningkatan kualitas pendidikan akan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan produktivitas tenaga kerja sehingga peluang memperoleh pekerjaan dengan pendapatan yang lebih baik semakin besar. Selain itu, peningkatan kualitas kesehatan akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi secara produktif, sedangkan meningkatnya standar hidup menunjukkan semakin baiknya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dengan demikian, peningkatan IPM akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga mampu menurunkan tingkat kemiskinan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hayati dan Suherty (2025) yang menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia akan meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan, yang pada akhirnya mampu mengurangi tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Selatan. Temuan serupa juga diperoleh Prasetyoningrum dan Sukmawati (2018), yang menyatakan bahwa IPM berpengaruh secara langsung dan negatif terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sihombing et al. (2024) yang menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia pada periode 2004–2023. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa tidak signifikannya pengaruh IPM terhadap kemiskinan diduga disebabkan oleh belum optimalnya pencapaian tiga dimensi utama penyusun IPM, yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak (daya beli). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan IPM belum sepenuhnya mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara merata sehingga dampaknya terhadap penurunan tingkat kemiskinan belum terlihat secara signifikan

3.4 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan

Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki koefisien sebesar 0,011095 dengan nilai probabilitas 0,5406 sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi belum mampu memberikan pengaruh yang nyata terhadap perubahan tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya bersifat inklusif sehingga manfaatnya belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan aktivitas ekonomi lebih banyak dinikmati oleh kelompok atau wilayah tertentu, sedangkan masyarakat berpendapatan rendah belum memperoleh manfaat yang memadai untuk keluar dari kondisi kemiskinan. Akibatnya, peningkatan pertumbuhan ekonomi belum secara langsung diikuti oleh perubahan tingkat kemiskinan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nainggolan (2020) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis mampu menurunkan tingkat kemiskinan karena manfaat pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat miskin. Selain itu, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan tidak selalu berjalan secara konsisten, sehingga peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan. Temuan serupa juga diperoleh Pangiuk (2018), yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi pada periode 2009-2013.

Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnama (2017) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi mampu mengurangi tingkat kemiskinan apabila diikuti oleh peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Perbedaan hasil penelitian ini diduga dipengaruhi oleh karakteristik perekonomian masing-masing wilayah. Pada penelitian ini, pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur belum sepenuhnya bersifat inklusif karena aktivitas ekonomi masih terkonsentrasi di kawasan industri dan perkotaan, sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Akibatnya, peningkatan pertumbuhan ekonomi belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

3.5 Pengaruh Bantuan Sosial terhadap Kemiskinan

Variabel bantuan sosial memiliki koefisien sebesar 0,225834 dengan nilai probabilitas 0,0000, sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Dalam model lin-log, koefisien tersebut mengindikasikan bahwa setiap kenaikan bantuan sosial sebesar 1% berkaitan dengan peningkatan tingkat

kemiskinan sebesar 0,0023 poin persentase, ceteris paribus. Namun, hubungan positif ini tidak menunjukkan adanya hubungan kausal langsung, melainkan mengindikasikan bahwa bantuan sosial cenderung lebih banyak dialokasikan pada daerah dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Dengan demikian, bantuan sosial bersifat responsif terhadap kondisi kemiskinan, bukan sebagai penyebab meningkatnya kemiskinan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aliyah et al. (2025) yang menyatakan bahwa belanja bantuan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa bantuan sosial merupakan instrumen kebijakan kesejahteraan sosial yang diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan sebagai bentuk perlindungan sosial. Oleh karena itu, daerah dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi umumnya menerima alokasi bantuan sosial yang lebih besar.

Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Riyandini (2024), yang menyatakan bahwa belanja bantuan sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur periode 2017–2022. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa tidak signifikannya pengaruh bantuan sosial terhadap kemiskinan disebabkan oleh besaran bantuan yang diterima masyarakat miskin relatif terbatas sehingga belum mampu mengentaskan kemiskinan.

Perbedaan hasil penelitian ini diduga dipengaruhi oleh perbedaan periode penelitian dan model analisis. Selain itu, perubahan kondisi sosial ekonomi dan kebijakan pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial pada setiap periode penelitian juga dapat memengaruhi hubungan antara bantuan sosial dan tingkat kemiskinan sehingga menghasilkan temuan yang berbeda. Dengan demikian, hubungan positif yang ditemukan tidak menunjukkan bahwa bantuan sosial menyebabkan kemiskinan meningkat, tetapi menggambarkan bahwa pemerintah mengalokasikan bantuan sosial lebih besar pada daerah yang memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi. Selain itu, efektivitas bantuan sosial dalam menurunkan kemiskinan juga dipengaruhi oleh ketepatan sasaran penerima, besaran bantuan yang diberikan, serta keberlanjutan pelaksanaan program.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dengan model terpilih yaitu *Fixed Effect Model (FEM)*, menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2010–2024 cukup beragam. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang berarti semakin tinggi tingkat pendidikan dan kualitas pembangunan manusia, maka tingkat kemiskinan akan menurun. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka, ketimpangan pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Di sisi lain, belanja bantuan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang mengindikasikan bahwa bantuan sosial lebih bersifat responsif terhadap kondisi kemiskinan yang ada.

Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan manusia sebagai strategi utama dalam pengentasan kemiskinan. Selain itu,

pemerintah daerah perlu meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial agar tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga mampu menurunkan kemiskinan secara berkelanjutan. Kebijakan pembangunan ekonomi juga perlu diarahkan agar lebih inklusif sehingga manfaat pertumbuhan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, T., Bahtiar, M. Y., & Zulaikah. (2025). Pengaruh bantuan sosial , tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2018-2022 dalam perspektif ekonomi islam. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (JASMIEN)*, 5(2), 491–508. <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Jasmien/article/view/1184>
- Ardian, R., Syahputra, M., & Dermawan, D. (2022). Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. *EBISMEN: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 1(3), 190–198. <https://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/EBISMEN/article/view/90>
- Barika, & Yusnida. (2021). Karakteristik kemiskinan di Kota Bengkulu tahun 2015-2019. *Jurnal Untirta.*, 11(1), 55–74. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/Ekonomi-Qu/article/view/11275>
- BPS. (2021). *Survei angkatan kerja Nasional*. <https://www.bps.go.id/id/publication/2021/08/09/790fa89d429d86821c12f57b/booklet-survei-angkatan-kerja-nasional-februari-2021.html>
- BPS. (2024). *Statistik Indonesia* 2024. <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/c1bacde03256343b2bf769b0/statistik-indonesia-2024.html>
- Dianti, N. M., Sishadiyanti, & Wahed, M. (2024). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, dan ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 7(1), 5–8. <https://jdep.upnjatim.ac.id/index.php/jdep/article/view/472>
- Febriyani, A., & Anis, A. (2022). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi dan indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 3(4), 9–16. <https://ejournal.unp.ac.id/students//index.php/epb/article/view/12375>
- Hayati, N. A., & Suherty, L. (2025). Pengaruh jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Selatan. *JIEP: Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 8(2), 455–466. <https://jiep.ulm.ac.id/index.php/jiep/article/view/682>
- Herdiansyah, D., & Kurniati, P. S. (2020). Pembangunan sektor pendidikan sebagai penunjang indeks pembangunan manusia di Kota Bandung. *Jurnal Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi*, 8(1), 43–50. <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi/article/view/2765>
- Kaulihoa, T., & Adjasi, C. (2018). FDI and income inequality in Africa. *Oxford Development Studies*, 46(2), 250–265. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13600818.2017.1381233>
- Mandjarreki, S. (2021). Analisis sosial fenomena kemiskinan (Perspektif Sosiologi). *Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial*, 4(1), 75–95. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jmks/article/view/28442>
- Mirza, D. S. (2011). Pengaruh kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah tahun 2006-2009. *Economics Development Analysis Journal*, 4(2), 1–15. <https://journal.unnes.ac.id/nju/jejak/article/view/4645>
- Mukhtar, S., Saptono, A., & Arifin, A. Samsul. (2019). The analysis of the effects of human development index and opened unemployment levels to the poverty in Indonesia. *Jurnal Ecoplan*, 2(2), 77–89. <https://ecoplan.ulm.ac.id/index.php/iesp/article/view/20>

- Nainggolan, E. (2020). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara (2010-2019). *Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya (JMBEP)*, 6(2), 89–99. <https://www.jurnal.eka-prasetya.ac.id/index.php/MBEP/article/view/58>
- Nizar, F., & Arif, M. (2023). Pengaruh rata lama sekolah, pengeluaran perkapita, pendapatan asli daerah, investasi, tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara Barat tahun 2012-2021. *KOMITMEN: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 4(1), 48–58. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/komitmen/article/view/23599>
- Pangiuk, A. (2018). Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan kemiskinan di Provinsi Jambi tahun 2009-2013. *Iltizam Journal of Shariah Economic Research*, 2(2), 44–66. <https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/iltizam/article/view/160>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, 1 (2020). <https://peraturan.go.id/files/bn1781-2020.pdf>
- Prasetyoningrum, A. K., & Sukmawati, U. S. (2018). Analisis pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia. *Journal Stainkudus*, 6(2), 217–240. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/3663>
- Prasastianwar, D., & Arif, M. (2023). Determinan tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh Periode 2017- 2021. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, 1(4), 31–41. <https://jsr.ums.ac.id/determinasi/article/view/215>
- Pratama, Y. C. (2014). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 4(2), 210–223. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/esensi/article/view/1966>
- Purnama, N. I. (2017). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara. *EKONOMIKAWAN: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 17(1), 62–70. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan/article/view/1181>
- Putri, E. M., & Putri, D. Z. (2021). Pengaruh upah minimum, tingkat pengangguran terbuka, pendidikan dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan*, 10(2), 106–114. <https://ejournal.unp.ac.id/index.php/ekosains/article/view/115640>
- Riyandini, S. (2024). Analisis pengaruh ipm, upah minimum, TPT dan bantuan sosial terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2022. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 3(4), 1270–1285. <https://jdess.ub.ac.id/index.php/jdess/article/view/365>
- Rossa, A., & Ananda, C. F. (2024). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, belanja bantuan sosial, dan belanja pendidikan terhadap kemiskinan. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 3(3), 803–813. <https://jdess.ub.ac.id/index.php/jdess/article/view/353>
- Safrinja, E., Andiny, P., Mardhani, M., & Safuridar, S. (2025). Analisis ketimpangan pendapatan , indeks pembangunan manusia , dan upah minimum terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 3(1), 119–132. <https://journal.areai.or.id/index.php/jepi/article/view/1098>
- Salsabila, N., Muna, N., Pradana, V. H., & Nurcahya, W. F. (2024). Analisis efektivitas bantuan sosial (Bansos) dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 1–13. <https://economics.pubmedia.id/index.php/jmsd/article/view/317>
- Sari, Y. A. (2021). Pengaruh upah minimum tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 10(2), 121–130. <https://journal.stiem.ac.id/index.php/jureq/article/view/785>
- Sayekti, I. W., & Purnomo, D. (2026). Mengakselerasi sdgs no poverty : Bukti empiris dari ketimpangan pendapatan, IPM, dan UMK di Jawa Tengah. *SEIKO : Journal of Management & Business*, 9(1), 945–958. <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/view/11632>
- Sihombing, A. E., Hasibuan, Z. H., Situngkir, D., Lumbangaol, R. Y., & Ardhana, M. B. (2024). Pengaruh tingkat pengangguran, pendidikan, dan indeks pembangunan manusia terhadap

- tingkat kemiskinan di Indonesia periode 2004-2023 melalui metode pendekatan ECM. *JEMB : Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(6), 49–61.
<https://jurnalistiqomah.org/index.php/jemb/article/view/1546>
- Silaban, P. S. M. J., Sembiring, I. P. S. B., & Sitepu, V. A. B. (2020). Analisis pengaruh PDRB dan inflasi terhadap pengangguran terbuka di Sumatera Utara Periode 2003-2019. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 11(02), 127–132.
<https://ejournal.uigm.ac.id/index.php/EGMK/article/view/1077>
- Simanungkalit, E. F. B. S. (2020). Pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Journal of Management*, 13(3), 327–340.
<https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/JEM/article/view/3311>
- Soleh, A. (2015). Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(2), 197–209. <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/er/article/view/15>
- Tisniwati, B. (2012). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(1), 33–46.
<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jep/article/view/3714>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development*. https://books.google.co.id/books?id=m8kMk_KbSX4C&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false
- UNDP. (2020). *Human development report 2020 the next frontier human development and the anthropocene*. <https://hdr.undp.org/system/files/documents/hdr2020.pdf>

